

STRATEGI PENANGANAN COVID-19 DAN PERUBAHAN ANGGARAN PEN 2021 DALAM Mendukung PPKM DARURAT

19

Hilma Meilani

Abstrak

Lonjakan kasus positif Covid-19 beberapa minggu terakhir Juni 2021 menyebabkan pemerintah memberlakukan PPKM Darurat Jawa-Bali yang menimbulkan tantangan bagi pemulihan ekonomi. PPKM Darurat dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2021 sehingga pemerintah perlu menyusun strategi agar ekonomi tetap terjaga selama pembatasan berlangsung. Tulisan ini mengkaji strategi pemerintah dalam penanganan lonjakan kasus Covid-19, perubahan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021, serta permasalahan dan upaya dalam mempercepat penyerapan anggaran program PEN 2021. Untuk menangani lonjakan kasus Covid-19 dan menjaga pemulihan ekonomi, pemerintah melakukan realokasi anggaran PEN 2021 dengan menambah anggaran kesehatan, perlindungan sosial, dan insentif usaha. Refocusing anggaran juga perlu dilakukan untuk mendukung kebijakan PPKM Darurat. Penyerapan anggaran PEN 2021 yang masih rendah perlu mendapat perhatian pemerintah. Terkait hal ini, DPR dalam pembahasan RAPBN Tahun 2022 perlu memperhatikan agar alokasi anggaran kesehatan dan perlindungan sosial dalam penanganan Covid-19 sesuai dengan kebutuhan riil dan mengantisipasi ketidakpastian perekonomian akibat pandemi Covid-19.

Pendahuluan

Lonjakan kasus positif Covid-19 beberapa minggu terakhir Juni 2021 mendorong Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tanggal 2 Juli 2021 menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali atau PPKM Darurat Jawa-Bali, yang berlaku mulai tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan 20

Juli 2021. Pemerintah juga memutuskan untuk memperketat PPKM Mikro di luar Pulau Jawa dan Bali sejak 6 Juli hingga 20 Juli 2021. Pembatasan aktivitas yang lebih ketat dilakukan untuk mengurangi penularan Covid-19 di masyarakat sehingga kenaikan jumlah kasus dapat dikendalikan dan mengurangi beban layanan kesehatan.

Pemberlakuan PPKM Darurat menimbulkan tantangan bagi pemulihan ekonomi pada tahun 2021 akibat pandemi Covid-19. Menteri



Keuangan Sri Mulyani memperkirakan pemulihan ekonomi tahun ini tertahan akibat lonjakan kasus Covid-19. Pemberlakuan PPKM Darurat berimplikasi pada berkurangnya mobilitas masyarakat dan konsumsi rumah tangga (Republika, 13 Juli 2021).

Untuk menghadapi lonjakan kasus Covid-19 dan menjaga pemulihan ekonomi pada Kuartal III-2021, pemerintah perlu menyusun strategi agar ekonomi tetap terjaga selama pembatasan berlangsung. Tulisan ini mengkaji strategi pemerintah dalam penanganan lonjakan kasus Covid-19, perubahan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 dalam mendukung pemberlakuan PPKM Darurat, serta permasalahan dan upaya pemerintah dalam mempercepat penyerapan anggaran PEN 2021.

Strategi Penanganan Lonjakan Kasus Covid-19

Pemerintah menetapkan tiga kerangka strategi dalam menghadapi lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi di Indonesia, yakni deteksi, terapeutik, dan vaksinasi. Strategi ini dijalankan sesuai dengan petunjuk dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Strategi untuk mengatasi pandemi untuk orang yang sehat adalah perubahan perilaku atau 3M, deteksi atau 3T (*tracing, testing, treatment*), dan vaksinasi. Sedangkan untuk yang sudah sakit adalah strategi perawatan (*terapeutik*). Pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan jumlah pengetesan dan pelacakan menjadi tiga sampai empat kali lipat dari sebelumnya (www.kominfo.com, 2 Juli 2021).

Anggaran penanganan kesehatan harus menjadi prioritas utama pemerintah untuk mendukung pelaksanaan PPKM Darurat. Kenaikan anggaran kesehatan digunakan

antara lain untuk membiayai penanganan diagnostik seperti pengujian (*testing*), pelacakan (*tracing*), dan perawatan (*treatment*) pasien Covid-19 yang jumlahnya mengalami peningkatan, serta digunakan untuk vaksin dan bantuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pemerintah perlu mengkompensasi penghasilan masyarakat yang hilang sejalan dengan pelaksanaan PPKM Darurat untuk menjaga daya beli dan stabilitas konsumsi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Juni 2021 menunjukkan bahwa Indeks Harga Konsumen (IHK) mencatatkan deflasi untuk pertama kalinya pada tahun ini, yaitu terjadi deflasi 0,16%.

Kemenkeu mengalokasikan tambahan anggaran perlindungan sosial untuk mendukung PPKM dengan memperpanjang program Bantuan Sosial Tunai (BST) selama 2 bulan untuk meringankan masyarakat yang terdampak pelaksanaan PPKM Darurat. Pemerintah juga memberikan stimulus program ketenagalistrikan untuk masyarakat pelanggan 450 VA dan 900 VA, serta memberikan bantuan rekening minimum dan biaya beban atau abonemen listrik terutama bagi pelanggan bisnis, industri, dan sosial dengan sasaran 1,14 juta pelanggan, yang diperpanjang hingga September 2021 (<https://www.kemenkeu.go.id/>, 2 Juli 2021).

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH Said Abdullah memberi rekomendasi kepada pemerintah agar melakukan *refocusing* anggaran belanja pada APBN semester II-2021 jika kasus positif Covid-19 terus melonjak naik, dan dialokasikan kepada kebutuhan anggaran belanja untuk memperkuat penanganan Covid-19. *Refocusing* anggaran ini tidak hanya pada belanja kementerian dan lembaga (K/L), tetapi juga anggaran pemerintah daerah (www.dpr.go.id, 5 Juli 2021). *Refocusing* anggaran belanja dapat dialokasikan untuk

memperkuat penanganan Covid-19 dan mempercepat *testing*, *tracing*, dan vaksinasi Covid-19 agar jangkauan rakyat yang mendapatkan layanan vaksinasi Covid-19 semakin banyak.

Perubahan Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021

Pemberlakuan PPKM Darurat menyebabkan pemerintah mendesain ulang pagu anggaran Program PEN 2021 yang bertujuan untuk mempertajam sektor-sektor yang menjadi prioritas dalam menangani lonjakan kasus Covid-19. *Pertama*, anggaran perlindungan sosial semula Rp148,27 triliun ditambah sehingga menjadi Rp153,86 triliun. Tambahan anggaran tersebut dialokasikan untuk mempercepat penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dana desa, bansos tunai, hingga diskon listrik. Perlindungan sosial menjadi aspek penting untuk mempertahankan perekonomian ke depan agar daya beli masyarakat tetap menguat sehingga bisa mendorong *demand* sektor usaha.

Kedua, anggaran kesehatan menjadi Rp193,93 triliun, dari semula sebesar Rp172,84 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk mempercepat dan menambah

vaksinasi, *tracing* dan *testing*, perawatan, insentif dan santunan tenaga kesehatan, obat-obatan, biaya isolasi mandiri, insentif perpajakan kesehatan, sarana dan prasarana alat kesehatan, dan sebagainya.

Ketiga, insentif usaha menjadi Rp62,83 triliun, atau bertambah dari pagu awal sebesar Rp56,73 triliun. Insentif perpajakan untuk dunia usaha perlu dilanjutkan untuk keberlangsungan dunia usaha agar bisa bertahan di tengah pandemi dan tetap mempekerjakan karyawannya.

Keempat, anggaran dukungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Korporasi turun menjadi sebesar Rp127,85 triliun. Penurunan ini untuk program jaminan untuk kredit korporasi yang masih belum mengalami kenaikan. *Kelima*, anggaran program prioritas turun menjadi sebesar Rp117,04 triliun. Kedua program yang anggarannya diturunkan tersebut telah melalui evaluasi pelaksanaan pemerintah pasca pelaksanaan tahun lalu dan di Semester I 2021 realisasinya masih rendah dan manfaat ekonomi dan *multiplier effect*-nya rendah (Investor Daily, 6 Juli 2021). Perubahan anggaran PEN 2021 untuk mendukung PPKM Darurat selengkapnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Perubahan Anggaran PEN 2021 dan Realisasi PEN Semester I 2021

Dalam Triliun Rupiah

Program	Alokasi Awal PEN 2021	Tambahan/ Pengurangan	Perubahan Anggaran	Realisasi Semester I	Realisasi Semester II
Perlindungan Sosial	148,27	5,59	153,86	66,43	43,2
Kesehatan	172,84	21,09	193,93	47,71	24,6
Insentif Usaha	56,73	6,10	62,83	45,07	71,7
Dukungan UMKM dan Korporasi	193,74	(21,97)	171,77	51,27	29,8
Program Prioritas	127,85	10,81	117,04	41,83	35,7
Total	699,43		699,43	252,31	

Sumber: Kementerian Keuangan, *Harian Kontan* 8 Juli 2021.

Berdasarkan data Kemenkeu realisasi program penanganan Covid-19 dan PEN pada Semester I 2021 mencapai Rp252,31 triliun, atau 36,22% dari pagu anggaran PEN 2021 sebesar Rp699,43 triliun. Realisasi anggaran kesehatan pada Semester I 2021 baru sebesar Rp47,71 triliun atau 24,6% dari anggaran sebesar Rp193,93 triliun. Persentase tersebut merupakan yang paling rendah dibandingkan dengan program lainnya.

Realisasi anggaran perlindungan sosial telah mencapai Rp66,43 triliun pada Semester I 2021 atau sebesar 43,2% dari anggaran sebesar Rp153,86 triliun, namun nominalnya lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp70,72 triliun.

Permasalahan dalam Penyerapan Anggaran PEN 2021

Permasalahan rendahnya penyerapan anggaran kesehatan pada Semester I 2021 menurut Direktur *Institute for Development on Economics and Finance* (Indef) Tauhid Ahmad antara lain terletak pada mekanisme administrasi *reimbursement* dan proses verifikasi data untuk klaim biaya penanganan di sektor kesehatan yang banyak dan panjang (<https://ekonomi.bisnis.com/>, 25 Juni 2021).

Sedangkan Direktur *Center of Economic and Law Studies* Bhima Yudhistira menilai anggaran yang sudah dicairkan masih sangat kecil karena terdapat kesenjangan (*gap*) antara perencanaan dan eksekusi pencairan anggaran sehingga perlu dilakukan evaluasi total untuk mencari hambatan dari penyaluran, apakah terletak di pemerintah pusat atau di level birokrasi di daerah (https://ekonomi.bisnis.com, 1 Juli 2021).

Oleh karena itu pengelolaan anggaran kesehatan harus dilakukan

secara efisien agar mencukupi kebutuhan dalam penanganan pandemi Covid-19. Pemerintah diharapkan dapat mengevaluasi penyerapan anggaran PEN agar lebih efektif dalam menangani pandemi Covid-19 dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Upaya Mempercepat Penyerapan Anggaran PEN 2021

Pemerintah berupaya mempercepat pencairan anggaran kesehatan melalui kegiatan *tracing*, *testing*, dan *treatment* bagi pasien di rumah sakit maupun di tempat isolasi mandiri. Aspek kesehatan menjadi perhatian utama untuk menghentikan penyebaran kasus Covid-19, termasuk percepatan vaksinasi. Pada masa PPKM Darurat, pemerintah mempercepat pencairan bansos, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan kuota internet, dan Kartu Prakerja dengan menambah kuota peserta. Pemerintah juga memberikan bansos bagi usaha mikro, penjaminan kredit usaha, dan subsidi bunga. Menkeu Sri Mulyani juga menyebutkan bahwa pemerintah akan terus memonitor perkembangan penyaluran anggaran lima program PEN (Kontan, 8 Juli 2021).

Untuk mempercepat mekanisme klaim dan penyelesaian *dispute* klaim biaya perawatan pasien Covid-19, pemerintah mengeluarkan Kepmenkes No. HK.01.07/Menkes/4718/2021 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Covid-19 bagi RS Penyelenggara Pelayanan Covid-19. Walaupun penyerapan PEN Semester I 2021 lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp124,6 triliun atau 17,92% dari pagu, namun penyerapannya masih kecil. Penyerapan

anggaran kesehatan perlu menjadi perhatian utama untuk menangani lonjakan kasus Covid-19.

Penutup

Pemerintah dan seluruh masyarakat perlu bekerja sama agar penanganan Covid-19 dapat berjalan efektif dan pemulihan ekonomi nasional dapat diakselerasi. Pemberlakuan PPKM Darurat yang disertai dengan strategi pemerintah untuk penanganan lonjakan kasus Covid-19 melalui *tracing*, *testing*, dan vaksinasi menjadi prioritas utama agar kasus harian Covid-19 kembali menurun dan pemulihan aktivitas ekonomi dapat kembali dilanjutkan.

Penyerapan anggaran berbagai program PEN 2021 untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional perlu dipercepat oleh pemerintah. Penambahan anggaran kesehatan dan perlindungan sosial melalui realokasi anggaran PEN 2021 harus dialokasikan secara efisien agar kebutuhan penanganan Covid-19 dan target-target yang ditetapkan pemerintah dapat tercapai.

DPR perlu memastikan agar realisasi program kebijakan PEN oleh pemerintah dapat berjalan dengan optimal, dan pemerintah perlu melakukan *refocusing* APBN Semester II Tahun 2021 untuk penanganan pandemi Covid-19. Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, DPR juga perlu memperhatikan agar alokasi anggaran kesehatan dan perlindungan sosial dalam penanganan Covid-19 tahun 2022 mendatang sesuai dengan kebutuhan riil dan mengantisipasi ketidakpastian perekonomian akibat pandemi Covid-19.

Referensi

- "Banggar *Refocusing* Anggaran Belanja Penting Untuk Vaksinasi Hingga Bansos", <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/33667/t/Banggar%3A+'Refocusing'+Anggaran+Belanja+Penting+Untuk+Vaksinasi+Hingga+Bansos>, diakses 5 Juli 2021.
- "Hadapi PPKM Darurat Pemerintah Mendesain Ulang Anggaran PEN", <https://newssetup.kontan.co.id/news/hadapi-ppkm-darurat-pemerintah-mendesain-ulang-anggaran-pen?page=all>, diakses 7 Juli 2021.
- "Hanya Relokasi, Anggaran PC-PEN Tetap Rp699,43 Triliun", *Investor Daily*, 7 Juli 2021, hal. 6.
- "Pemerintah Tetapkan Tiga Kerangka Strategi Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19", <https://www.kominfo.go.id/content/detail/35405/pemerintah-tetapkan-tiga-kerangka-strategi-hadapi-lonjakan-kasus-covid-19/0/berita>, diakses 2 Juli 2021.
- "Pemulihan Ekonomi Tertahan", *Republika*, 13 Juli 2021, hal. 10.
- "Penanganan Covid-19: Penyerapan Anggaran Kesehatan Rendah, Ini Penyebabnya", <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210625/9/1409799/penanganan-covid-19-penyserapan-anggaran-kesehatan-rendah-ini-penyebabnya>, diakses 25 Juni 2021.
- "Penyerapan Anggaran Pemulihan Ekonomi Mini", *Kontan*, 8 Juli 2021, hal. 2.
- "Realisasi PEN Kuartal II/2021 Tidak Optimal, Ekonom Dorong Evaluasi Total", <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210701/10/1412383/>

realisasi-pen-kuartal-ii2021-tidak-optimal-ekonom-dorong-evaluasi-total, diakses 1 Juli 2021.
"Respon APBN dalam Mendukung Pemberlakuan PPKM Darurat", <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/respon-apbn-dalam-mendukung-pemberlakuan-ppkm-darurat/>, diakses 2 Juli 2021.



Hilma Meilani
hilma.meilani@dpr.go.id.

Hilma Meilani, S.T., MBA., menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada pada tahun 2002, pendidikan S2 jurusan Finance pada Program Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada pada tahun 2008. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda Kebijakan Ekonomi pada bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku, antara lain: "Analisis Kemampuan Keuangan Daerah" (2013), "Desentralisasi Fiskal dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (2014)", dan "Peran Kebijakan Persaingan Usaha untuk Meningkatkan Efisiensi menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) (2015)".

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.